

346.0482  
IDE  
1 9  
2002



## LAPORAN HASIL PENELITIAN

### IDENTIFIKASI PRODUK UNGGULAN JAWA TENGAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PENDAFTARAN HKI

Oleh

L. TUKAN LEONARD,SH,MA  
Dan Tim

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2002

---

DIBIAYAI OLEH DANA APBD PROPINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2001

## DAFTAR PERSONALIA

- 1. Ketua : L. Tukan Leonard,SH,MA ✓
- 2. Anggota :
  - Budi Santoso,SH,MS
  - Kholis Roisah,SH,MHum
  - Ery Agus Priyono,SH,MSi
  - Amiek Soemarmi,SH,MHum
  - Rinitami Nyatriyani,SH,MHum

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Personalia	iii
Daftar Isi	iv
Prakata	v
Bab I : Pendahuluan	1
Bab II : Tinjauan Pustaka	7
A. UKM pada Umumnya	7
B. UKM dan HKI	48
Bab III : Metode Penelitian	68
Bab IV : Hasil Penelitian	70
A. Identifikasi Produk Unggulan Jawa Tengah	70
B. Profil UKM Yang dibantu Pendaftaran HKI	75
Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi	97
Daftar Referensi	99

## PRAKATA

Proyek perlindungan hukum produk unggulan daerah Jawa tengah melalui Hak kekayaan Intelektual(Haki) merupakan hasil kerjasama antara Klinik Haki Fakultas Hukum UNDIP, Propinsi Jawa Tengah( Biro Hukum). Kegiatan ini dalam rangka membantu memberikan perlindungan hukum atas produk unggulan yang tersebar di berbagai daerah di Jawa tengah didalam rangka mempersiapkan pelaku usaha menengah dan kecil dalam memasuki pasar bebas yang penuh persaingan dengan memberikan proteksi atas hasil karya intelektual mereka. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh pelaku usaha yang cukup tangguh di pasaran serta mengurangi berbagai tindak pelanggaran Haki pada khususnya. Proyek perlindungan ini juga merupakan tindak lanjut dari proyek sebelumnya untuk memberikan perlindungan terhadap produk unggulan daerah sebanyak 70 buah. Dengan proyek tahun anggaran 2002 ini diupayakan diberikan perlindungan Haki sebanyak 35 produk unggulan daerah. Namun demikian mengingat prosedur serta mekanisme pendaftaran haki juga mempunyai tata cara serta prosedur formal maupun substansial yang harus dipenuhi maka kemungkinan gagal atau ditolaknya pendaftaran dapat saja terjadi.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, pelaksana kegiatan telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu diucapkan terima kasih pada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua dan Anggota DPRD, khususnya komisi A;
3. Asisten Gubernur Bidang perekonomian;
4. Kepala Biro Hukum beserta Staf Propinsi Jawa tengah;
5. Seluruh kepala Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di 35 Kabupaten /Kota di Jawa tengah;
6. Dekan Fakultas Hukum UNDIP;
7. Rekan Dosen Di Fakultas Hukum UNDIP yang membantu pengumpulan data lapangan;
8. Berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu.

Tim Pelaksana menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih mengalami kekurangan pada beberapa sisi, untuk itu kritik dan saran membangun selalu terbuka untuk penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberi manfaat pada berbagai pihak yang berminat, serta pihak lain yang mempunyai kewenangan dalam penentuan kebijakan di bidang Haki yang berkaitan dengan produk Unggulan daerah.

Semarang Oktober 2002

Tim Pelaksana

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Propinsi Jawa Tengah terletak di bagian tengah Pulau Jawa, dengan luas sekitar 3,25 juta Km<sup>2</sup> atau 1,7 % dari luas wilayah Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 29,9 juta jiwa atau sekitar 15 % dari jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah kepadatan 919 orang per Km<sup>2</sup>.

Propinsi Jawa tengah terdiri dari 35 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7932 desa dan 6 kota yang meliputi 606 kelurahan. Dari segi perekonomian, realisasi penerimaan anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa tengah selama dua tahun anggaran terakhir cenderung menunjukkan peningkatan, yakni dari Rp.5120 Milyar pada tahun 1997/1998 menjadi Rp.588,4 Milyar pada tahun anggaran 1998/1999. Peningkatan terbedar justru bersumber pada Pos sumbangan dan bantuan. Penerimaan pendapatan asli daerah (PADS) terhadap APBD propinsi Jawa tengah sangat besar. Hal tersebut terlihat pada kontribusi PAD terhadap APBD Propinsi Jawa tengah pada tahun anggaran 1996/1997 dan tahun anggaran 1997/1998 mencapai 67 %, tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun anggaran 1998/1999 menjadi hanya 42 %.

Dalam struktur PAD, bagian terbesar justru berasal dari pajak daerah yang memberikan kontribusi mencapai lebih dari 80 % pada tahun anggaran 1996/1997. Angka tersebut mengalami penurunan menjadi 78 % pada tahun anggaran 1997/1998 yang disebabkan karena terjadinya peningkatan penerimaan kontribusi lain-lain. Dalam realisasinya situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan hilangnya sebagian besar sumber PAD. Pada tahun anggaran 1998/1999 realisasi penerimaan PAD hanya mencapai 245 Milyar, jika dibandingkan dengan tahun anggaran tahun sebelumnya telah terjadi penurunan sebesar 33 % (Rp.119 Milyar). Penurunan tersebut terbesar terjadi karena penurunan penerimaan pada sektor pajak BBNKB sebesar 109 Milyar (*Monitorting the Regional Implementation of Indonesia's Structural Reforms and Deregulation program, kasus Jawa Tengah dan DIY, hal 38*)

Dengan diberlakukannya UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, juga telah menjadi penyebab turunnya PAD Propinsi Jawa tengah, karena terjadinya penghapusan dan pengalihan beberapa jenis retribusi daerah yang

diperkirakan mencapai 30 Milyar. Penurunan PAD berdampak pada penurunan APBD yang mengakibatkan menurunnya kemampuan daerah untuk membiayai program pembangunan daerah. Untuk itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk memulihkan kondisi tersebut agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Hal tersebut dapat ditempuh dengan memaksimalkan potensi daerah yang ada guna memumuk PAD dengan mengurangi beban yang semestinya dikenakan pada masyarakat.

Secara teori, Kotler dkk, menyebutkan bahwa hal-hal yang dianggap berpengaruh terhadap kesejahteraan bangsa (masyarakat) adalah Modal alami (*Natural capital*) misalnya; tanah, air, mineral, kayu, hutan dsb. Modal Fiskal (*Physical capital*) yang dapat berupa mesin-mesin, bangunan, fasilitas publik lainnya. Modal Insani (*Human Capital*) yaitu SDM yang produktif. Serta modal Sosial (*Social capital*) yang termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai keluarga, masyarakat, berbagai organisasi yang mengikat masyarakat (Kotler dkk, *The Marketing of Nations, A Strategic Approach to Building National Wealth*, The Free Press, New York 1997). Dengan demikian apabila suatu daerah kurang memiliki modal natural serta modal fiskal yang cukup maka dapat mulai melirik untuk mengembangkan modal yang lain, misalnya modal insani dan modal social. Hal ini berarti bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka identifikasi potensi daerah sebaiknya tidak hanya bersumber atau didasarkan hanya dari sumber daya alam, tetapi juga aspek kekayaan intelektual yang dapat memberikan nilai tambah. Dari identifikasi tersebut setiap aspek kekayaan intelektual didokumentasi kemudian diberikan perlindungan yang memadai.

HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau sering dikenal dengan *Intellectual Property Rights* melindungi hampir semua hasil kreatifitas intelektual seseorang hampir di seluruh aspek kehidupan umat manusia, dari hal yang tradisional (jamu misalnya) sampai dengan system digital. Perlindungan tsb didalam rangka untuk menumbuh kembangkan inovasi serta gairah menemukan atau menciptakan produk yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Akan tetapi, perlindungan yang amat berharga tersebut harus dilakukan upaya aktif dari penemu, pencipta, pemilik untuk melakukan registrasi atau pendaftaran, dengan demikian pada situasi tertentu (terutama bagi pelaku usaha kecil/ menengah dengan segala keterbatasannya) diperlukan motivasi atau dorongan dari Pemerintah untuk

merealisasikannya. Dorongan tersebut dapat berupa bantuan untuk melakukan pendaftaran hak (Merek, Paten biasa/ sederhana, hak Cipta, Desain Industri) secara Cuma-Cuma bagi pelaku usaha kecil oleh Pemerintah sebagai stimulan bagi pelaku usaha yang lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Disadari atau tidak Hak akan merupakan aset perusahaan yang sangat berharga serta mempunyai nilai komersial dalam kegiatan bisnis. Apabila dikelola dengan baik maka hak akan memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha, antara lain akan meminimalkan risiko usaha dari tuntutan pihak lain, mempunyai aspek komersial, serta dapat memberikan ketenangan usaha yang sangat dibutuhkan.

Bulan Januari tahun 2000 adalah tahun yang penting bagi Indonesia, yaitu ditandai dengan berlakunya ketentuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) secara penuh di negara kita. TRIPs adalah sebuah ketentuan internasional di bidang Hak Kekayaan intelektual yang disetujui oleh banyak negara termasuk Indonesia dalam konferensi Organisasi Perdagangan Dunia di Maroko tahun 1994. TRIPs memuat norma standar perlindungan bagi karya intelektual manusia dan menempatkan perjanjian internasional ini sebagai dasar dan pedoman yang harus diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan HKI di negara anggota. TRIPs juga memuat norma penegakan hukum bagi pelanggaran HKI secara ketat.

Globalisasi perdagangan telah menghadirkan pasar bebas yang menjangkau ke pelosok penjuru dunia tanpa batas. Pasar bebas akan membawa dampak banyaknya produk asing hadir di pasaran lokal, yang akan berakibat persaingan antar pelaku usaha menjadi semakin ketat. Persaingan yang ketat antar pelaku usaha sangat potensial terjadinya pelanggaran HKI, dapat berupa pelanggaran paten, merek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang.

Perubahan ditingkat nasional menuntut pula perubahan ditingkat lokal yang pada akhirnya menuntut perubahan ditingkat regional. Hal ini berarti globalisasi perdagangan ditingkat internasional harus diantisipasi sampai ditingkat regional. Dengan demikian Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota harus pula mempersiapkan diri untuk mengantisipasi hal ini. Perlu diambil langkah kongkrit untuk mengantisipasinya.



Penyesuaian internal Jawa tengah harus diarahkan pada kemandirian wilayah untuk mengurangi berbagai ketergantungan yang selama ini telah berjalan. Kemandirian wilayah harus didukung dengan menggali berbagai potensi yang ada di daerah masing-masing agar mampu memberikan daya saing dalam berkompetisi. Untuk itu sejauh dapat diberikan perlindungan yang memadai atas karya intelektual manusia atau produk ciri khas daerah dalam berbagai bentuk maka akan merupakan langkah awal yang sangat bermanfaat untuk dilakukan.

Untuk mewujudkan hal di atas maka dibutuhkan anggota masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, menengah yang sadar dan memahami HKI secara baik yang diharapkan akan meningkatkan "posisi tawar" dalam mewujudkan kemandirian wilayah Jawa tengah. Untuk itu, upaya pemberian perlindungan hak atas produk unggulan Jawa tengah yang kebanyakan melibatkan pelaku usaha kecil/ menengah melalui pendaftaran perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Program pemberian bantuan perlindungan hukum Hak Kekayaan intelektual atas produk unggulan daerah Jawa tengah pernah dilakukan pada tahun anggaran 2001, dengan melakukan registrasi produk Unggulan Daerah sebanyak 70 buah, yang berasal dari 35 Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 69 untuk pendaftaran merek dan 1 untuk pendaftaran paten sederhana. Melihat animo serta masih banyaknya produk unggulan daerah yang belum mempunyai kesempatan untuk dilindungi HKI pada tahun anggaran 2001, maka pada tahun anggaran 2002 dilakukan program lanjutan untuk melindungi PUD yang sama sebanyak 35 PUD dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa tengah di Enam wilayah Eks Karisidenan di Jawa Tengah, yang penentuannya akan ditentukan kemudian. Dengan demikian akan diajukan sebanyak *35 (Tiga Puluh Lima)* pendaftaran Hak.

#### B. Perumusan Masalah

1. Potensi serta ragam PUD yang layak mendapat perlindungan.
2. Bentuk perlindungan HKI yang cocok untuk PUD tersebut.

#### C. Tujuan Kegiatan